

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Conditionality Mechanism sebagai mekanisme sanksi baru bagi Uni Eropa diterapkan kepada Hongaria karena Hongaria dianggap mengalami kemunduran demokrasi dan pelanggaran *rule of law* yang tercantum dalam pasal 2 TEU. Perubahan sistem pemerintahan Hongaria menjadi demokrasi iliberal tersebut dapat terjadi dengan adanya kebangkitan dari Viktor Orban dan Partai Fidesz sebagai partai populis sayap-kanan pasca Krisis Finansial 2008 yang kemudian memenangkan pemilu selama empat kali berturut-turut sejak tahun 2010. *Conditionality Mechanism* yang memaksakan penerapan demokrasi liberal di Hongaria kemudian disekuritisasi oleh pemerintah populis sayap-kanan karena dianggap mengancam identitas masyarakat Hongaria dan tidak sesuai dengan *way of life* mereka yang bernilai nasionalisme, konservatif, dan memegang teguh agama Kristen katolik.

Tahapan sekuritisasi yang dijalankan oleh pemerintah populis sayap-kanan Hongaria memiliki perbedaan dengan sekuritisasi tradisional, dimana sekuritisasi dari kelompok populis memiliki lima karakteristik atau ciri khusus yang mampu mengisi kekurangan konsep sekuritisasi tradisional dalam menjelaskan bagaimana gagasan *existential relevant* di dalam *speech act* dari aktor sekuritisasi dapat diterima oleh *audience* atau *referent object* sebagai variabel keberhasilan dari sekuritisasi. Lima karakteristik tersebut adalah *anti elite*, *political outsider as a securitizing actor*, *agential audience*, *the homogenous people as a referent object*, dan *identification between the actor*

and the audience.

Tahapan sekuritisasi dari pemerintah sayap-kanan Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa hanya sampai pada tahap kedua saja, yaitu tahap meyakinkan audiens, dan belum mencapai tahap *breaking free of rules* sebagai tahap terakhir. Meskipun begitu, jika dinilai berdasarkan dua *facilitating conditions* dari *copenhagen school* (secara internal dan eksternal), maka sekuritisasi yang dijalankan sudah masuk ke dalam kategori berhasil. Karena sekuritisasi yang dijalankan secara intrinsik telah sesuai dengan tata bahasa keamanan dalam sektor sosial, aktor sekuritisasi memiliki wewenang dan mendapatkan legitimasi, serta *existential threat* yang diajukan realistis dan dapat dipercayai dengan adanya survey dari badan *think tank* Szazadveg.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sekuritisasi dan populisme sangat berkaitan erat, dan pemerintah populisme sayap-kanan Hongaria telah menjalankan sekuritisasi sejak kemenangan mereka di pemilu tahun 2010, dengan memanfaatkan setiap krisis yang dihadapi, dari krisis finansial 2008, krisis pengungsi 2015, hingga *Conditionality Mechanism*. Dengan memanfaatkan sekuritisasi, pemerintah populisme sayap-kanan Hongaria dapat menciptakan identitas bersama dengan masyarakat Hongaria, dan menarik hati dan suara masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Jan Werner-Muller, populisme merupakan politik identitas, namun tidak semua politik identitas termasuk ke dalam populisme.

5.2 Saran

Penelitian ini tentu saja masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap agar kedepannya akan ada penelitian-penelitian

yang lebih mendalam mengenai sekuritisasi Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism* Uni Eropa, mengingat bahwa *Conditionality Mechanism* masih akan diterapkan dalam dua tahun ke depan dan Hongaria belum mengambil *extraordinary act* untuk menghadapi ancaman penangguhan hak finansial tersebut. Selain itu penelitian dengan pendekatan data lain, seperti wawancara langsung dengan pihak pemerintah populis sayap-kanan Hongaria akan melengkapi temuan-temuan mengenai sekuritisasi Hongaria terhadap *Conditionality Mechanism*. Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk menggali isu ini lebih dalam lagi dengan konsep dan pengumpulan data yang lebih kompleks dan mendalam agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

